

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Alasan Pemilihan Judul

Ada beberapa alasan pokok yang mendorong penulis menetapkan, “Kekalahan Liberal Democratic Party (LDP) Dalam Pemilu Majelis Tinggi Jepang Juli 2007” menjadi Judul penelitian ini. Alasan pertama adalah karena untuk pertama kalinya dalam sejarah, Liberal Democrat Party (LDP) yang berkuasa di Jepang sejak 1955 dalam masa kepemimpinan Perdana Menteri Shinzo Abe yang terkenal dengan tokoh yang berhaluan Konservatif dan cenderung nasionalistik dan merupakan Seorang Perdana Menteri paling muda, kalah telak dalam pemilu Majelis Tinggi Juli 2007.

Alasan kedua, karena dalam waktu hanya tiga setengah dasawarsa Sistem Politik Jepang telah berkembang dari otoritarisme yang hampir sepenuhnya, menjadi setengah-setengah Demokrasi Parlementer Inggris. Sistem Parlementer seperti yang ditetapkan dalam konstitusi tahun 1947, pada hakikatnya adalah penjelasan dan perbaikan sistem yang secara spontan berkembang dijepang pada tahun 1920an. Perubahan-perubahan pokok adalah menjadikan Diet secara nyata sebagai “*Badan kekuasaan negara yang tertinggi*” dan “*satu-satunya badan pembuat undang-*

...” (Sugita, 1997: 11). Setelah memilih Perdana Menteri. Ia dipilih dari

kalangan Diet, khususnya oleh majelis rendah. dan kemudian memilih menteri-menteri kabinet dan pejabat-pejabat yang lain diangkat.

Sejak selesainya Perang Dunia II sampai tahun 1950, Pemerintahan Jepang pernah dipegang oleh partai-partai yang konservatif. Partai Liberal Demokrat (LDP) yang terbentuk dari gabungan Partai Liberal dan Partai Demokrat pernah memegang pemerintahan yang cukup lama dari tahun 1955. Kebijakan LDP selalu dikaitkan dengan pendapat partai untuk mendapatkan dukungan politik dan ekonomi dari AS.

Pada September 2006 yang lalu LDP memboyong seorang tokoh yang konservatif yaitu Shinzo Abe. Prioritas program utama LDP pada masa kepemimpinan Abe adalah memperkuat kembali identitas nasional Jepang, dengan penguatan dan modernisasi personil dan peralatan militer. Tetapi dukungan yang diberikan masyarakat kepada LDP dibawah pimpinan Shinzo Abe tidak berjalan lama. Tanggal 29 Juli 2007 dalam Pemilu Majelis Tinggi, LDP harus menelan kekalahan pahit dan membawa Partai Demokrat Jepang menguasai kursi Majelis Tinggi untuk pertama kalinya dalam sejarah Jepang.

Oleh karenanya dalam skripsi ini penulis mengambil judul **“KEKALAHAN LIBERAL DEMOCRATIC PARTY (LDP) DALAM PEMILU MAJELIS**

## **B. Tujuan Penulisan**

1. Penulis ingin mengetahui faktor apa yang menjadi penyebab Kekalahan LDP dalam Pemilu Majelis Tinggi Juli 2007.
2. Penulis ingin mengetahui program kerja LDP dalam masa Kepemimpinan PM Shinzo Abe sehingga menyebabkan kekalahan LDP dalam Pemilu Majelis Tinggi 2007.
3. Penulis ingin mengetahui Sistem Politik Kepartaian di Jepang, yang mana LDP dapat berkuasa demikian lama.
4. Untuk memenuhi tugas sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan ( S I ) pada jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

## **C. Latar Belakang Masalah**

Sejak selesainya Perang Dunia II sampai tahun 1950, di Jepang terdapat dua Golongan Konservatif yang menamakan diri Kelompok Liberal yang merupakan penerus partai lama yang disebut *Seiyukai*, dan Kelompok Progresif Democrat yang berasal dari Kelompok *Minseito*. Tahun 1955 mereka bergabung lagi dan membentuk partai baru yang bernama Partai Liberal Democrat atau *Liberal Democratic Party – LDP (Jiyu Minshuto)*. LDP sejak awal merupakan manifestasi dari kepentingan konservatif. Disamping itu, LDP juga tidak dapat dinisahkan dari birokrasi dan

korporasi swasta. LDP adalah salah satu ujung dari segitiga besi antara LDP, birokrasi, dan korporasi.

Ditubuh LDP terbagi dalam pengelompokan faksi-faksi yang lebih dilandasi oleh kepemimpinan tokoh perorangan dan bukan oleh penggolongan berdasarkan kepentingan ideologis.<sup>1</sup> Hal ini dapat memberi kesan bahwa LDP terbagi dalam beberapa golongan yang mempunyai perbedaan pendapat dan gaya kepemimpinan. Ini biasanya dikecam sebagai kekuatan-kekuatan yang terpecah di dalam partai, tetapi sebenarnya merupakan salah satu mekanisme pokok yang digunakan partai untuk mendapatkan usaha yang terkoordinasi erat dalam *Diet*.<sup>2</sup> Dan juga dengan adanya perbedaan pandangan pelaksanaan politik ini, mereka tetap berusaha dalam koridor untuk kepentingan satu partai.

LDP merupakan Partai politik di Jepang yang telah menguasai kekuasaan selama 50 tahun terakhir. Sekitar awal 1980an sebuah Koran terkemuka melakukan penelitian sikap warga Jepang terhadap LDP sebagai partai pemerintah. Hasilnya menunjukkan bahwa rata-rata responden sangat mendukung tokoh-tokoh puncak, kebijaksanaan pemerintah serta keberhasilan LDP menciptakan stabilitas politik serta kemakmuran ekonomi. Sepuluh tahun yang lalu Partai Oposisi masih dipandang sebagai Partai tanpa citra yang hanya ingin ikut memerintah.

Pada Pemilu 2003 yang lalu, masa kepemimpinan Koizumi Junichiro, kehidupan politik di Jepang telah mengarah pada dua poros kekuatan politik di dalam

---

<sup>1</sup> Irsan, Abdul, *Jepang politik Domestik, Global dan Regional*, Hananudin University Press 2005

<sup>2</sup> S. H. ... 2006 *Diambil dari ...*

negeri yaitu antara LDP dengan DPJ, dan sedang menuju “system dua partai”. Walaupun dukungan telah menurun sejak tahun 1993 tetapi LDP kembali bangkit dan masih memegang suara mayoritas dalam pemilu parlemen di Jepang. Kemenangan LDP di Majelis Tinggi menjadi batu loncatan PM Koizumi untuk mempertaruhkan jabatannya dalam memenangkan pemilu Majelis Rendah. LDP berhasil meraih kemenangan berkat seorang pemimpinnya yaitu Koizumi yang membatasi kampanye menjadi satu tema saja yakni swastanisasi Bank Tabungan Pos.

Tahun 2005, jumlah pembayar pajak mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena para wajib pajak tidak mampu membayar pajak dan tidak terkena wajib pajak karena usianya yang tidak produktif lagi. Jumlah penduduk yang tidak produktif di Jepang yang berusia di atas 65 tahun mencapai 20% dari seluruh jumlah penduduk Jepang. Ini artinya sumber pajak Jepang mengalami penurunan mencapai 20%.

Masa kepemimpinan PM koizumi telah berakhir dan diganti dengan seorang tokoh yang konservatif yang bersifat sangat nasionalistik yang tidak jauh berbeda dengan Koizumi tentunya. Pada September 2006 yang lalu LDP memboyong Shinzo Abe dengan mengantongi jumlah kursi sebanyak 339 kursi dari 476 kursi di Majelis Rendah Jepang. Shinzo Abe adalah seorang Perdana Menteri paling muda dalam sejarah Jepang.

Masa Kepemimpinan Shinzo Abe dalam LDP memang tidak membuat LDP berubah haluan karena Abe masih tetap mempunyai program yang sama dengan

Koizumi dalam masalah reformasi ekonomi dan melanggengkan stabilitas dalam politik Jepang. Sebagai contoh dalam mengatasi masalah pajak yang tinggi di Jepang, PM Abe juga menggunakan Program Swastanisasi Bank Tabungan Pos dan membuat neraca keuangan negara Jepang menjadi lebih baik, hal ini dilakukan untuk menjawab kekhawatiran sebagian besar masyarakat Jepang bahwa pemerintah akan menaikkan pajak serta mengurangi tunjangan-tunjangan sosial seperti dana pensiun, perawatan anak, asuransi kesehatan dan sebagainya, untuk mengejar perbaikan kondisi keuangan pemerintah dan PM Abe juga berjanji bahwa tidak ada kenaikan pajak atau pengurangan tunjangan sosial selama kondisi ekonomi belum membaik (growth).

Kemudian program di bidang pertahanan, LDP dalam masa kepemimpinan PM Abe, lebih fokus untuk memperkuat kembali identitas nasional Jepang, maka dijalankanlah program penguatan dan modernisasi personil dan peralatan militer. Dalam kebijakan ini, PM Abe cenderung mendukung AS dalam mengirimkan Militernya ke Afghanistan untuk berusaha mendapatkan kursi tetap di Dewan Keamanan PBB. Dan yang kedua, memperbaiki hubungan dengan China dan Korea Selatan yang sempat merenggang akibat kunjungan diam-diam PM Koizumi ke Kuil Yasakuni.

Menjelang pemilu di Majelis Tinggi, PM Abe terus melakukan program-programnya untuk memenuhi janji yang telah di ucapkannya pada masa kampanye, untuk menekan pengeluaran yang tidak penting dan menjawab ketakutan masyarakat terhadap pembayaran pajak yang tinggi ini. PM Abe memotong gaji Perdana Menteri

sebesar 30 % dan 10% untuk para menteri di Kabinetnya, dan untuk mengatasi skandal korupsi di dalam tubuh Kabinetnya, PM Abe melakukan perombakan Kabinet yang terkena skandal Korupsi. Dalam polling yang dilakukan Yomiuri Shimbun, Koran terkemuka di Jepang, mengatakan dukungan Abe naik 10% akibat perombakan kabinetnya dalam mengatasi skandal Korupsi.<sup>3</sup>

Pada tanggal 29 Juli 2007 PM Abe membawa LDP dalam Pemilu Majelis Tinggi untuk merebut suara mayoritas di Parlemen ini. Parlemen Jepang sendiri terdiri atas Majelis Tinggi dan Majelis Rendah. Masing-masing memiliki 242 kursi dan 480 kursi. Anggota Majelis Tinggi dipilih tiap enam tahun, separuh diantaranya dipilih tiap tiga tahun. Sedangkan Majelis Rendah dipilih tiap empat tahun sekali. Pemilu Jepang, seringkali disederhanakan sebagai pertarungan kekuatan antara partai berkuasa Partai Demokrat Liberal (LDP) melawan Oposisi bukan LDP. Lalu berdasarkan tradisi bahwa ketua partai yang menang akan menjadi Perdana Menteri.

Menjelang pemilu di Majelis Tinggi, PM Abe terus melakukan program-programnya untuk memenuhi janji yang telah di ucapkannya pada masa Kampaye, untuk menekan pengeluaran yang tidak penting dan menjawab ketakutan masyarakat terhadap pembayaran Pajak yang tinggi ini, PM Abe memotong gaji Perdana Menteri sebesar 30 % dan 10% untuk para menteri di Kabinetnya, dan untuk mengatasi skandal Korupsi di dalam tubuh Kabinetnya, PM Abe melakukan perombakan Kabinet yang terkena skandal Korupsi. Dalam polling yang dilakukan

---

<sup>3</sup> *Yomiuri Shimbun*, 29 Juli 2007, hal. 105. *Kelahiran Takah LDP di Jepang*. Diakses pada tanggal 26

Yomiuri Shimbun, Koran terkemuka di Jepang, mengatakan dukungan Abe naik 10% akibat perombakannya dalam mengatasi skandal Korupsi.

Voting diwarnai dengan suasana yang amat ketat, Partai Penguasa Liberal Democratic Party (LDP) beserta Mitra Koalisinya New Komeito melawan Partai Oposisi Democratic Party (DPJ) yang berkoalisi dengan JCP (Japan Komunis Party) dan SDP (Sosialis Democrat Party).

**Tabel 1**  
**Jumlah Kursi di Majelis Tinggi**

<b>PARTAI POLITIK</b>	<b><math>\Sigma</math> KURSI 2004</b>	<b><math>\Sigma</math> KURSI 2007</b>
<b>LDP (Liberal Democratic Party)</b>	49	37
<b>New Komeito</b>	11	9
<b>DPJ (Democratic Party of Japan)</b>	50	60
<b>JCP (Japan Komunis Party)</b>	6	8
<b>SDP (Sosialis Democrat Party)</b>	5	7

- Ket:** - Di Jepang terdapat dua kubu partai yaitu partai konservatif dan partai oposisi. Partai konservatif adalah LDP yang berkoalisi dengan New Komeito, sedangkan partai Oposisi adalah DPJ yang berkoalisi dengan JCP dan SDP.
- Total Jumlah Perolehan Kursi di Majelis Tinggi sebanyak 242 Kursi, LDP dan Mitra Koalisinya New Komeito memperoleh 106 Kursi, sedangkan DPJ dan Mitra Koalisinya JCP dan SDP memperoleh 136 kursi.

*Sumber: Disusun sendiri berdasarkan pengambilan data di website  
<http://www.sangiin.go.jp/eng/index.htm>*

Dari Perolehan Jumlah Kursi yang didapat LDP di Majelis Tinggi Jepang berdasarkan Tabel diatas, menunjukkan LDP harus menelan kekalahan pahit dalam pemilu kali ini. Pemerintahan koalisi Abe sendiri tidak akan terjungkal dengan

kekalahan di Majelis Tinggi, sebab koalisi memegang mayoritas di Majelis Rendah. Namun, kekalahan itu bakal menghambat proses legislasi dan mengancam terjadinya kemacetan kebijakan. Dalam hasil polling dalam pemilu Majelis Tinggi kali ini untuk pertama kalinya dalam sejarah LDP yang berkuasa dijepang sejak 1955 kalah telak. Dengan kekalahan ini oposisi utama partai Demokrat Jepang (DPJ) kini menguasai mayoritas kursi Majelis Tinggi untuk kali pertamanya dalam sejarah Jepang.

#### **D. Pokok Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahannya adalah: **“Faktor-faktor apakah yang menyebabkan kekalahan LDP pada Pemilu Majelis Tinggi 29 Juli 2007?”**

#### **E. Kerangka Dasar Pemikiran**

Teori bentuk penjelasan penting umum yang memberitahukan kita mengapa sesuatu terjadi dan kapan sesuatu itu bisa diduga akan terjadi, jadi selain dipakai untuk eksplanasi teori juga menjadi dasar bagi prediksi.<sup>4</sup>

Penggunaan kerangka dasar teori dimaksudkan untuk menentukan arah dan tujuan penelitian serta membantu didalam memilih konsep yang tepat dalam pembentukan hipotesa. Sebagaimana lazimnya sebuah penelitian, guna memudahkan pengembangan analisa disini penulis mencoba menggunakan konsep pendapat-

---

<sup>4</sup> <http://www.scribd.com/doc/100000000/100000000>

pendapat para ahli yang mendukung dan relevan dengan permasalahan yang penulis teliti. Diantaranya sebagai berikut:

### **1. Konsep Partai Politik**

Robert Michels mendefinisikan Partai Politik sebagai salah satu komponen infrastruktur politik yang mempunyai fungsi utama yaitu mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan.<sup>5</sup> Untuk itu partai politik menjalankan aktifitas yang penting yaitu berpartisipasi di sektor pemerintahan, dalam artian berusaha mendudukan orang-orang menjadi pejabat pemerintah. Dalam rangka mencapai hal tersebut partai politik harus mampu mengaitkan input yang berupa tuntutan dan dukungan masyarakat yang dinamis dengan kebijakan output partai secara tepat jika menghendaki mekanisme partai memberi hasil yang diharapkan. Karena itu dibutuhkan elit partai yang mampu mengkonversikan input tadi menjadi output partai seperti program dan kebijakan-kebijakan partai. Bila kepemimpinan partai lemah, maka anggota-anggotanya akan cenderung memisahkan diri dan membentuk faksi yang saling berlawanan untuk berebut pengaruh.<sup>6</sup>

Dalam Sistem Politik lebih dari satu partai agar dapat menguasai pemerintahan maka Partai Politik harus dapat memperoleh mayoritas kursi di parlemen. Partai-partai Politik mempunyai daya tarik politik yang tidak sama dalam berbagai lapisan masyarakat sesuai dengan pengalaman sosialnya yang khas dan latar belakang sejarahnya masing-masing. Oleh karena itu, agar dapat menang dalam pemilihan

---

<sup>5</sup> Robert Michels, *Partai Politik : Kecenderungan Oligarkhis dan Birokrasi* (Jakarta : CV. Rajawali, 1984) hal.92

<sup>6</sup> Ibid, hal 93.

umum, partai harus memiliki tingkatan-tingkatan yang tinggi dalam hal kepanduan dan konsentrasi dari organisasinya. Kepanduan menentukan daya saing, yaitu menggunakan sumber daya dan memanfaatkan arena pertarungan seperti parlemen nasional, pemilihan umum, media massa dan massa pemilih serta kemampuan merumuskan tujuan-tujuan dan menentukan strategi-strategi.<sup>7</sup>

Senada dengan pergeseran ini, partai kemudian menjadi *catch-all party* atau partai yang tidak pandang bulu. Catch all yang pertama kali dikemukakan oleh Otto Kirchheimer, menunjuk pada suatu kondisi ketika partai berusaha merangkul sebanyak mungkin kelas-kelas sosial yang ada dalam masyarakat untuk dijadikan sebagai anggotanya dengan cara menawarkan program-program serta keuntungan-keuntungan lainnya dengan tujuan utama yaitu memenangkan pemilihan umum.<sup>8</sup>

Menurut Otto Kirchheimer, transformasi Partai ideologis menjadi Partai Catch-all meliputi pengurangan secara drastis beban ideology partai, penguatan kelompok pemimpin tertinggi dimana penilaian terhadap kebaikan, ataupun kelalaian mereka lebih didasarkan pada sumbangannya terhadap efisiensi sistem sosial secara keseluruhan daripada mengidentifikasikasi terhadap tujuan organisasi mereka masing-masing. Selain itu partai tidak lagi di letakkan pada suatu kelompok sosial tertentu, hal ini dimaksudkan agar dapat merekrut para pemilih dari berbagai kalangan. Partai

---

<sup>7</sup> Robert Dahl, dalam Marriam Budiarjo, ed, *Partisipasi Partai Politik* (Jakarta: Gramedia, 1981) hal. 108 dan 131.

<sup>8</sup> Otto Kirchheimer, *Transformer Sistem-sistem Kepartaian Eropa Barat*, dalam Dr. Ichlasul Amal, e.d, *Tapi tapi Mutakhir Partai Politik (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1996)* hal 45-62

juga mengamankan jalan masuk bagi kepentingan dengan maksud untuk memperoleh dukungan dalam pemerintahan melalui kelompok kepentingan.

Setiap pemilihan dianggap memiliki hak komunikatif dengan negara yang harus bersifat bebas dari setiap interferensi. Pemilih diharuskan menjatuhkan pilihannya berdasarkan prinsip pertimbangan (*deliberation*) yang bebas. Terlepas dari Sistem Pemilu yang digunakan, pemilu selalu melibatkan rangkaian perilaku kultural dan sosial.

## 2. Teori Memilih Partai Politik

Sementara itu mengapa masyarakat memilih partai politik, menurut Mark N. Hangopian adalah disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:

### 1. Motif ideologi partai tersebut.

Ideologi sebagai landasan perjuangan yang menentukan kualitas, arah gerak dan tujuan partai, memiliki peranan yang besar untuk menarik dan menghimpun dukungan rakyat. Terlepas apakah itu *Sel Justification* dari elit partai ataukah *Mass Deception* oleh pimpinan partai, citra partai yang diidealisir tersebut mampu dijadikan sebagai alat penarik pendukung untuk melawan dan mengalahkan saingan politiknya.<sup>9</sup>

### 2. Keuntungan yang mungkin diraih oleh suatu kelompok atas pilihannya.

### 3. Isu-isu yang berkembang pada saat itu (*Nature of time*)

---

<sup>9</sup> Peranan Ideologi sebagai kamufase atau murni dibahas dalam : Maurice Duverger : Sosiologi Politik, ed. Daniel Dhakidae (Jakarta : Rajawali Press, 1985) hal. 266-273

Dengan pertimbangan ini individu memilih partai yang mereka anggap layak dan sanggup untuk memimpin pemerintahan. Kelayakan itu ditentukan oleh isu yang sedang berkembang. Perkembangan ini selanjutnya menuntut partai untuk dapat tanggap dan mengetahui siapa dan bagaimana massa yang diharapkan jadi pendukungnya. Partai kemudian jadi lebih reformis dan representatif melalui kompromi sedikit demi sedikit terhadap ideologinya masing-masing sehingga partai kehilangan ciri khas ideologinya yang kemudian digantikan dengan lintas kelas, rasional, agama dan kepentingan.<sup>10</sup>

Menurut C. Wright Mills dan ahli Sosiologi lainnya masalah sosial adalah Isu Publik. Karena masalah sosial adalah Isu Publik, maka Partai politik mengangkatnya dalam kampanye pemilihan umum.<sup>11</sup> Sedangkan menurut Graham Maddox, partai politik percaya bahwa isu-isu tentang kebijakan-kebijakan ekonomi menjadi kunci sukses dalam pemilihan umum.<sup>12</sup>

#### 4. Tradisi individu dalam melakukan pemilihan (*No issue content*)

---

<sup>10</sup> Robert Michels, *Political Parties* (the Free Press of Glancoe, 1958) hal 304-305, dan Maurice Duverger, *Political Parties* (London : Muthen, 1954) hal 17

<sup>11</sup> C. Wright Mills, dikutip dari Thomas M. Meenaghan dan Robert O. Washington. *Policy Sosial and Welfore Sosial. Structure and applications*, The free press. Adivissions of Macmilan Publishing co.inch, New York 198. hal 34

<sup>12</sup> C. Wright Mills, *Political Parties*, The Free Press, Glancoe, 1958. hal 304-305

Jepang setelah Selesai Perang Dunia II sampai tahun 1950, terdapat dua golongan konservatif yang menamakan diri Kelompok Liberal yang merupakan penerus partai lama, tahun 1955 mereka bergabung dengan membentuk partai baru yang bernama Liberal Democratic Party (LDP). Pada tahun 1955 pertumbuhan politik nasional Jepang ditandai oleh adanya persaingan antara dua sikap politik yaitu antara mereka yang mau mempertahankan pola-pola lama yang konservatif (status Quo) dengan mereka yang menghendaki pola-pola progresif.

Mereka yang berpandangan konservatif adalah LDP dan Mitra Koalisinya New Komeito, Isu yang menjadi perekat terjadinya koalisi tersebut dikarenakan adanya tujuan yang sama dalam pengambilan kebijakan. Kebijaksanaannya adalah mempertahankan perjanjian Jepang Amerika dan mempertahankan UUD, dan pengikutnya berasal dari birokrasi, para pedagang, bisnis, pengusaha dan para kapitalis. Sedangkan yang bersifat progresif adalah DPJ dan mitra koalisinya JCP, SDP. Isu adanya Mitra Koalisi tersebut adalah Kebijaksanaannya melepaskan perjanjian Jepang Amerika dan mengadakan perbaikan dalam UUD. Partai Oposisi cenderung mengangkat isu-isu yang berkaitan dengan kehidupan Masyarakat Jepang dibandingkan masalah pertahanan Jepang yang diangkat oleh Partai Pemerintah yang dipimpin oleh LDP.

Kebijakan LDP dari dulu sering dikaitkan dengan kebijakan politik yang cenderung mendukung kebijakan politik dan ekonomi AS. Banyak para anggota LDP terdiri dari para birokrasi, pengusaha atau golongan dari kelas atas. Di tubuh LDP

sejak semula sudah terbagi dalam pengelompokan faksi-faksi yang lebih dilandasi oleh kepemimpinan tokoh perorangan.

Perdana Menteri Shinzo Abe yang terpilih September 2006 yang lalu membawa LDP dalam kebijakannya untuk memperkuat kembali identitas nasional Jepang dengan cara meningkatkan kembali peran Jepang dalam percaturan keamanan dunia yang mendukung AS dalam mengirimkan militernya ke Afganistan. Dukungan mulai merosot dengan kinerja LDP pada masa kepemimpinan Shinzo Abe. Abe dituduh terlalu fokus pada agendanya yang konservatif.

Sedangkan Input yang diinginkan Masyarakat Jepang adalah Perbaikan masalah dalam negeri yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Seperti misalnya masyarakat menginginkan kehidupan yang layak, Pemerintah segera menangani masalah Pengangguran yang kian meningkat, kemudian masalah Pajak yang sangat mahal. LDP telah melupakan Input yang sebenarnya Masyarakat inginkan. Kemudian LDP dalam Kepemimpinan PM Abe terjadi kelalaian dalam pengelolaan dana pensiun dan adanya skandal korupsi di dalam Kabinet Abe.

Sehingga pada pemilu Majelis Tinggi Juli 2007, dalam hasil Voting LDP mengalami penurunan popularitas dengan DPJ dan akhirnya kalah telak dalam pemilu tersebut. Kekalahan ini akan menghambat proses legislasi dan mengancam kemacetan kebijakan selanjutnya terutama nasib PM Abe dalam menjabat sebagai Perdana

## **F. Hipotesa**

Untuk menjawab fenomena tersebut di atas dengan berdasarkan pada landasan pemikiran penulis mencoba mengajukan hipotesa sebagai jawaban sementara bahwa kekalahan LDP dalam pemilu Majelis Tinggi Jepang 2007 di sebabkan oleh:

1. LDP mengabaikan persoalan Domestik Jepang.
2. LDP yang tercermin dalam Kabinet PM Abe diindikasikan sebagai pemerintahan yang Korup.

## **G. Metode Penulisan**

Agar penulisan ini terarah dan sesuai dengan kriteria keilmuan sehingga dapat dipertanggungjawabkan keobjektifannya, maka penulis menggunakan metode penelitian pustaka (Library Research), yaitu penelitian terhadap bahan-bahan yang merupakan data sekunder baik berupa buku, makalah, jurnal atau bahan bacaan lain yang relevan dengan topik yang penulis angkat.<sup>13</sup>

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif Research, yaitu metode atau pendekatan yang berusaha untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi dan berusaha untuk menganalisisnya dengan didukung dengan data-data yang ada.

---

<sup>13</sup> Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian, Delajar Offset*, Jakarta 1000, hal 1

## **H. Jangkauan Penulisan**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis memandang perlu membatasi ruang lingkup penelitian. Pembatasan ini dimaksudkan supaya penulis dapat lebih terarah dan mudah untuk dipahami sesuai dengan tujuan pembahasan, maka penelitian secara khusus membahas mengenai Kekalahan Liberal Democrat Party (LDP) dalam pemilu Majelis Tinggi Juli 2007.

## **I. Sistematika Penulisan**

Dalam Penulisan Skripsi ini, dibagi kedalam V Bab, masing-masing bab dibagi lagi kedalam sub-sub yang dapat diuraikan sebagai berikut:

### **BAB I           Pendahuluan**

Bab ini merupakan bagian pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Pokok Permasalahan, Kerangka Dasar Pemikiran, Hipotesa, Metode Pengumpulan Data, dan Jangkauan Penelitian.

### **BAB II           Dinamika Politik Di Jepang**

Bagian ini memaparkan tentang, tinjauan politik histories, gambaran umum negara Jepang, Partai Politik di Jepang, Sistem Kepartaian dan Tinjauan dominasi LDP dalam politik Jepang.

### **BAB III          Pemilihan Umum Jepang**

Secara keseluruhan bab ini menceritakan model Pemilihan Umum di Jepang serta LDP pada masa Pemerintahan Shinzo Abe

## BAB IV

### Kekalahan LDP (Liberal Democratic Party) Dalam Pemilu Majelis Tinggi Di Jepang

Rah ini memamerkan secara keseluruhan kekalahan LDP dalam